



KAITAN DIPLOMASI SAINS DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI: TINJAUAN KERJA SAMA PENDIDIKAN INDIA- INDONESIA

Demeiati Nur Kusumaningrum^{1*}, Yasinta Dinda Febriana, Fikry Muhammad Reza Al-Hasin,
Jordan Aria Adi Brata

¹Universitas Muhammadiyah Malang; Indonesia

²Center of Intermestic Studies, Lab of IRs Dept., University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

*email: demeiati.nk@umm.ac.id

Abstract

The Indian government offers 1000 doctoral programs for ASEAN countries. This extraordinary scholarship has not been provided by the previous administration. This phenomenon is perceived as Indian science diplomacy to perform the Act East Policy during the era of Modi. Through the conceptualization of science diplomacy, this study aims to explain Indian foreign policy orientation and India-Indonesia partnership in education. Primary data sources were obtained from an analysis of government reports, official website, and interviews with PPI India representative. Secondary data sources came from literature review on journal articles and media reports. This research examined that Indian foreign policy was oriented towards internationalism which aimed to strengthen its image as a great country. The India-Indonesia MoU on education in 2011 was signed one year after the implementation of AIFTA. Through research collaborations, faculty exchanges, and consortia of universities, India perceived as a country with an excellent education system in Indonesia.

Keywords: ASEAN; foreign policy; Modi; science diplomacy, soft power

Abstrak

Pemerintah India menawarkan 1000 program doktor kepada negara-negara di ASEAN. Fasilitas pendidikan yang luar biasa ini belum pernah diberikan pada pemerintahan sebelumnya. Fenomena ini diamati sebagai bentuk diplomasi sains India untuk mengimplementasikan kebijakan *Act East Policy* pada era PM Modi. Melalui konseptualisasi diplomasi sains, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi kebijakan luar negeri India dan kemitraan pendidikan dengan Indonesia sebagai studi kasus. Sumber data primer diperoleh dari hasil telaah laporan pemerintah, rilis laman resmi, dan wawancara kepada perwakilan PPI India. Sumber data sekunder didapatkan dari revid literatur artikel ilmiah dan analisis media. Penelitian ini menemukan bahwa pada era PM Modi, kebijakan luar negeri India berorientasi internasionalisme yang bertujuan untuk menunjukkan citranya sebagai negara besar. MoU India-Indonesia pada bidang pendidikan tahun 2011 ditandatangani satu tahun pasca berjalannya AIFTA. Melalui kolaborasi penelitian, pertukaran staf pengajar, dan konsorsium perguruan tinggi, pemerintah India menanamkan kesan yang baik sebagai negara dengan sistem pendidikan yang unggul.

Kata Kunci: ASEAN; diplomasi sains; kebijakan luar negeri; Modi; soft power

Pendahuluan

Perdana Menteri Shri Narendra Modi telah meluncurkan kebijakan pemberian beasiswa doktoral kepada negara-negara *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Pada KTT ASEAN-India di New Delhi yang diselenggarakan tanggal 25 Januari 2018, PM Modi, di hadapan para pemimpin dari 10 negara ASEAN, mengumumkan persekutuan Doktor di India untuk ASEAN. Dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan India-ASEAN, 1000 beasiswa bergelar Ph.D akan diberikan pemerintah India kepada warga negara ASEAN yang belajar di Institut Teknologi India bergengsi pilihan mereka. Beasiswa ini diharapkan dapat memperkuat hubungan historis yang mendalam antara India dan ASEAN (Agung, 2020; Ministry of Education, 2022). Program beasiswa yang sangat besar ini belum ada pada pemerintahan India sebelumnya.

Bidang-bidang *low politics* terutama pada sektor pendidikan, memang merupakan salah satu faktor yang membuat *soft power* lebih dapat diterima. Berdasarkan sejarah diplomasi, praktik baik ini telah dilakukan oleh negara-negara industri maju. Uni Eropa (UE) menghasilkan citra positif di kawasan Amerika Latin sebagai dampak dari kerja sama dengan Brazil, baik dalam lingkup bilateral maupun pada forum Mercosur. Nilai-nilai fundamental UE tentang regionalisme, HAM, perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, kohesi sosial, dan multilateralisme menjadi sumber *soft power* yang pada praktiknya menemukan keselarasan terhadap kondisi di Brazil dan Amerika Latin secara keseluruhan. Kombinasi antara diplomasi media, diplomasi kebudayaan, dan *niche diplomacy*¹ menjadikan kerja sama di antara kedua pihak tersebut semakin intens dan semakin mengokohkan posisi UE di kawasan tersebut (Azpíroz, 2015).

Selain itu *soft power* juga dapat sebagai alat kontestasi pengaruh terhadap sebuah negara ataupun kawasan. Seperti pada kasus Jepang yang kini telah menjadi '*cultural superpower*' di mata publik internasional, dibuktikan oleh Jepang dengan budaya populer – kuliner, musik, anime, upacara tradisional, dan manga- yang mendunia. Namun, instrumen tersebut ternyata tidak cukup untuk mewujudkan kepentingan Jepang melalui idenya untuk mempersatukan Asia yakni *Ajia Kontentsu Inisiatibu* (*Asia Content Initiative*). Wilayah Asia Tenggara dijadikan target Jepang untuk mendapatkan pengaruh

¹ Diplomasi *niche* dipopulerkan oleh Cooper (1998) yang berupaya mengkritisi bentuk diplomasi top-down yang kurang relevan. Dalam penelitian Alden & Vieira (2005) disebutkan definisi diplomasi *niche* sebagai diplomasi ceruk yang menandakan adanya tindakan diplomasi yang spesifik dalam suatu bidang tertentu. Diplomasi ceruk diyakini membantu negara-negara *middle power* berperan dalam politik global (Polanunu & Kusumaningrum, 2022)

yang kuat dalam rangka melawan kekuatan *soft power* Cina yang telah melekat di beberapa negara di kawasan. ODA (*Official Development Assistance*) pada akhirnya menjadi salah satu instrumen primer yang digencarkan, dengan mencatatkan Indonesia, Filipina, dan Vietnam sebagai penerima donor terbesar dari Negeri Matahari tersebut. Walhasil, berdasarkan studi masyarakat di ketiga negara tersebut, memandang Jepang lebih populer dan positif ketimbang Cina, walaupun pada beberapa waktu terakhir Negeri Tirai Bambu tersebut menunjukkan manuvernya (Han, 2015). Kombinasi antara *soft power* dan *hard power* inilah yang disebut sebagai *smart power* (Nye, 2009).

Lebih jauh, potensi Jepang tersebut dapat diekspansi lebih jauh dengan mengadakan kerja sama dengan Inggris yang mengemuka lebih dulu dalam bidang *soft power* karena kekuatan linguistik bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan menjadi tempat dari universitas terbaik di dunia. Baik Jepang dan Inggris memiliki kepentingan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia dan Eropa, sehingga melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan efek mutualisme bagi kedua negara. Komitmen kerja sama tersebut telah dibuktikan dengan pendirian *Japan House* di London dan kunjungan PM Theresa May ke Yokohama pada 2017 di mana kedua negara memiliki kesamaan pandangan tentang menjadikan masing-masing sebagai partner kemitraan prioritas. Kemitraan prioritas Jepang-Inggris ini menjadi pertanda bahwa kerja sama ini juga bersifat strategis dan diharapkan dapat menjadi suatu aliansi yang dapat saling memperkuat identitas masing-masing di tatanan global (Chatham House, 2019). Berdasarkan pemahaman tersebut, tulisan ini meyakini bahwa pemberian beasiswa doktoral kepada negara-negara ASEAN oleh pemerintahan PM Narendra Modi berkepentingan menguatkan kerja sama bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang selaras dengan orientasi dan tujuan kebijakan luar negeri India.

Kerangka Teori

Orientasi Kebijakan Luar Negeri: Relasi Soft Power dan Diplomasi Sains

Dalam rangka mencapai orientasi kebijakan luar negerinya, pemerintahan sebuah negara akan mendayagunakan semua instrumen diplomasi dan jalur diplomasi yang paling efektif. Dalam konteks sumber daya, pemerintah dapat mempertimbangkan kapasitas nasionalnya yang bersumber dari *hard power* atau *soft power*. Seperti dalam penelitian ini, diskursus HI memberikan pengalaman bagaimana pemanfaatan *soft power* sebagai

instrumen diplomasi yang strategis pasca Perang Dingin. *Soft power* diyakini lebih bermakna, menghemat anggaran militer, dan meminimalisir konflik antarnegara. Diplomasi sains sebagai salah satu praktik *soft power* telah banyak diterapkan oleh negara-negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Nye, Jr. *soft power* terletak pada kemampuan untuk membentuk kecenderungan atau persepsi orang lain. Hal tersebut lebih dari sekedar persuasi atau kemampuan untuk menggerakkan orang atau publik dengan argumen, tetapi juga kemampuan untuk menarik ketertarikan yang dimiliki agar mengarah pada persetujuan. *Intangible power* merupakan sumber daya dari *soft power* yang memiliki tumpuan utama pada (1) budaya – nilai, produk, dan tempat-tempat yang dianggap menarik bagi orang lain; (2) nilai-nilai politik – yang melekat sesuai dengan pandangan hidup negara di dalam dan di luar negeri; dan (3) kebijakan luar negeri – yang mana dipandang sah dan memiliki otoritas moral (Nye Jr., 2004).

Sebagai bentuk oposisi terhadap kerusakan dan penderitaan atas perang/kekerasan militer, *soft power* dinilai lebih bermanfaat untuk menciptakan harmoni dan kehidupan masyarakat internasional yang lebih baik. Dari studi Nye, Jr. terhadap pengaruh Amerika Serikat, citra sebuah negara menjadi komponen utama dari *soft power* yang membentuk penerimaan dan persepsi masyarakat internasional. Dalam praktiknya, upaya peningkatan citra suatu negara dilakukan terutama melalui kanal diplomasi budaya dengan cara membagikan dan menyebarkan ide serta nilai-nilai kolektif.

Lebih jauh, citra sebuah negara menentukan perannya dalam politik internasional. Dalam konteks hubungan bilateral, citra negara di luar negeri menjadi faktor yang secara tidak langsung menentukan saling pengertian antar pihak untuk inisiasi kerja sama internasional. Citra sebuah negara diperoleh melalui kapabilitas, peran, dan kesan yang ditangkap oleh masyarakat negara lain berdasarkan perilakunya dalam hubungan internasional. Sehingga, *people-to-people contact* menjadi determinan yang penting untuk mendukung kerja sama internasional. Berdasarkan pemahaman ini, diplomasi sains menjadi instrumen *soft power* yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak yang mendukung kemitraan bilateral maupun multilateral demi tercapainya tujuan kebijakan luar negeri.

Ada tiga dimensi diplomasi sains menurut pada ahli; (1) *informing foreign policy objectives with scientific advice (science in diplomacy)*, (2) *facilitating international*

science cooperation (diplomacy for science) and (3) using science cooperation to improve international relations between countries (science for diplomacy). Konsep ‘science in diplomacy’ menekankan ilmu pengetahuan yang berkontribusi untuk mencapai kesepakatan internasional. Menghadapi tantangan lingkungan, kesehatan, dan ketahanan pangan sudah pasti pembahasan dalam forum multinasional membutuhkan keahlian dari berbagai negara. Sebagai contoh, bagaimana kesepakatan yang terbentuk dalam Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim atau proses adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh negara-negara dalam berbagai tingkatan yang membutuhkan saran tata kelola pembangunan. Penemuan-penemuan ilmiah pada kenyataannya berperan penting dalam keberhasilan proses internasional seperti Protokol Montreal. Namun, masalah yang paling persisten yang dihadapi peneliti adalah bagaimana hal itu dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan untuk mendapatkan dukungan diplomatik yang strategis dan tepat waktu (Pisupati, 2020).

Selanjutnya, ‘diplomacy for science’ mengandung arti upaya mempromosikan kerja sama kritis dan strategis antar negara dalam menghadapi program dan inisiatif yang rumit, berbahaya, dan mahal. Dengan demikian, banyak program kerja sama bilateral, regional, dan multilateral disandarkan pada keberhasilan diplomasi untuk mempromosikan perlunya kerja sama ilmiah. Berdasarkan sebuah studi, upaya-upaya internasional seperti *Large Hadron Collider (LHC)* dan *International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)* adalah contoh-contoh sains rumit yang sedang diupayakan sebagai hasil dari diplomasi khusus yang telah menyiapkan agenda kolaborasi global. (Pisupati, 2020).

Menurut *Royal Society*, sains sebagai *soft power* berinteraksi dengan hubungan internasional dalam berbagai cara, mulai dari diplomasi budaya hingga jenis negosiasi dan mediasi yang lebih tradisional. Negara-negara di seluruh dunia mendukung pengembangan Panel Antar Pemerintah tentang Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati (IPBES) sejalan dengan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Inisiatif-inisiatif ini, bersama dengan program beasiswa dan pelatihan, membentuk fondasi sains yang bekerja untuk diplomasi – ‘science for diplomacy’. Negara-negara di seluruh dunia yang mendukung pembentukan panel, mengakui pentingnya fokus pada tantangan saat ini dan yang akan datang bagi konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati (Pisupati, 2020).

Dalam studi di Meksiko, Konsulat Jenderal Meksiko di Boston berhasil membantu menghubungkan peneliti Meksiko dan Amerika Serikat dari Boston ke pemerintah Kota Meksiko untuk memimpin penelitian dan memberi saran tentang kualitas udara di Mexico City (Ittelson & Mauduit, 2019). Amerika Serikat juga telah berhasil menggunakan diplomasi sains sebagai sarana rekonsiliasi dengan Kuba setelah pembekuan kerja sama bilateral melalui kolaborasi peneliti dan ilmuwan di Kuba dan Amerika Serikat dalam upaya menangani demam kuning (Fink et al., 2014). Di Amerika Latin, pembentukan Aliansi Pasifik (*Alianza del Pacífico*) oleh Chili, Kolombia, Meksiko dan Peru fokus pada pengembangan program beasiswa antarnegara. Negara-negara menyelenggarakan penelitian bersama terkait isu perubahan iklim telah membawa hasil yang signifikan bagi aliansi ini (Khanna & Moorthy, 2017). Seperti yang kita ketahui bersama, Aliansi Pasifik yang dibentuk pada 28 April 2011 ini berkomitmen mengembangkan kerja sama yang lebih komprehensif dalam bentuk integrasi politik, ekonomi, dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik (*Alianza del Pacífico*, 2022).

Pada prinsipnya, istilah diplomasi sains menggabungkan dua bidang '*human interest*' yang berbeda. Sains menjadi kepentingan mendasar yang bersifat universal dan non-politis, sedangkan diplomasi adalah proses pengelolaan hubungan antar negara berdaulat yang mencerminkan kepentingan nasional masing-masing negara. Diplomasi sains, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menjalin hubungan antar negara, untuk memecahkan masalah bersama yang dihadapi, dan untuk membangun pengembangan sains berdasarkan kemitraan internasional (Riordan & Torres Jarrín, 2020).

Diplomasi sains mengalami peningkatan perbincangan publik selama lima belas tahun terakhir. Diplomasi sains merupakan konsep gagasan dan gerakan yang diyakini menjembatani inisiatif sains dan kebijakan luar negeri mempertimbangkan kenyataan bahwa isu-isu kebijakan bersifat transnasional. Dalam beberapa isu misalnya, penyebaran penyakit, produksi pertanian, kelestarian alam, keamanan siber, penggunaan data biometrik dalam pengendalian perbatasan, dan perubahan iklim merupakan persoalan-persoalan yang perlu ditangani secara bersama-sama mengaplikasikan pengetahuan ilmiah tingkat lanjut. Kelangsungan hidup masyarakat kenyataannya secara struktural saling bergantung pada proses perdagangan internasional, migrasi tenaga kerja, layanan keuangan, komunitas digital, dan komunikasi virtual (Legrand & Stone, 2018). Ketika

sains, teknologi, dan inovasi berkelindan dalam hubungan internasional terkait isu-isu global seperti perubahan iklim dan pandemi, maka muncul kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara komunitas ilmiah dan diplomatik (Mauduit & Gual Soler, 2020).

Berdasarkan literatur, diplomasi sains adalah konsep yang cukup muda, dan mewakili penggabungan dua komponen yang sebelumnya berbeda - sains dan diplomasi. 'Ilmu' adalah jenis perolehan informasi berbasis bukti, dan 'diplomasi' adalah pendekatan damai untuk pengelolaan hubungan internasional; menyempurnakan konsep diplomasi tradisional yang pada umumnya bersifat komunikasi, negosiasi dan kompromi. Diplomasi sains, pada akhirnya, adalah prosedur di mana negara mewakili diri mereka sendiri dan kepentingan mereka di arena internasional berfokus pada bidang ilmu pengetahuan/ pendekatan ilmiah teknis (Ranjbar & Elyasi, 2019).

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan menganalisis diplomasi sains India terhadap Indonesia. Adapun sistematika pembahasan dalam tulisan ini akan menggambarkan 1) landasan kepentingan kebijakan luar negeri India, dan 2) kemitraan India-Indonesia bidang pendidikan sebagai penerapan sains diplomasi.

Metode

Tulisan ini berusaha menjelaskan kerja sama bidang pendidikan antara India dan Indonesia menjadi objek penelitian untuk memahami bekerjanya konsep diplomasi sains yang dihubungkan dengan kepentingan kebijakan luar negeri India pada periode pemerintahan PM Modi. Metode penelitian mengikuti prinsip-prinsip Miles & Huberman dalam menyeleksi, mengkategorikan, dan mensintesis data kualitatif berdasarkan preposisi kerangka teoritis (Nurdin & Hartati, 2019).

Data primer diperoleh dari hasil analisis laporan pemerintah (India, Indonesia, dan ASEAN) dan wawancara mendalam dengan perwakilan PPI India. Data sekunder berasal dari hasil revid literatur terhadap artikel-artikel publikasi penelitian komunitas epistemik dan lembaga internasional yang merilis topik kerja sama dengan India-Indonesia dan analisis teks pemberitaan media yang tersedia secara daring. Penyimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menggambarkan kerja sama pendidikan India-Indonesia sebagai penerapan diplomasi sains.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan India sebagai Tujuan Kebijakan Luar Negeri di Era Modi

Tulisan ini meyakini bahwa kebijakan luar negeri pada pemerintahan India pada era PM Narendra Modi berorientasi internasionalisme yang bertujuan membentuk citra kepemimpinan India sebagai negara yang besar. Dalam penerapannya, perilaku negara yang berorientasi internasionalisme didasarkan pada prinsip-prinsip yang menolak membatasi diri pada interaksi global dan mengejar agenda yang melibatkan dukungan terhadap pasar terbuka, lembaga internasional, kerja sama keamanan, komunitas yang demokratis dan berkemajuan, pemecahan masalah kolektif, kedaulatan bersama, dan supremasi hukum (Chaudoin et al., 2010; Stewart-Ingersoll & Frazier, 2010; Wang, 2011). Oleh sebab itu, penguatan citra India sebagai negara yang besar tentunya memuat kepentingan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.

1) **Kepentingan Politik**

PM Modi membangun identitas sebagai pelopor di kawasan melalui keterlibatannya secara aktif dalam forum-forum multilateral. Pemerintah India berusaha mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional dengan dukungan terhadap isu-isu strategis dan sikap kepemimpinannya dalam pembahasan agenda-agenda internasional di kawasan Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Pasifik (Ministry of External Affairs, n.d.).

Sebagian besar para pakar mengakui bahwa kebijakan luar negeri yang dikenal dengan doktrin '*Act East Policy*', ditujukan untuk membawa India lebih dekat ke negara-negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan China. India membangun kepercayaan melalui kerja sama dengan negara-negara mitra di bidang ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sosial budaya, di mana kekuatan-kekuatan besar ini juga terlibat (Basrur, 2017; Ogden, 2018).

Orientasi kebijakan luar negeri ini merupakan kelanjutan dari 'Kebijakan Melihat Timur' – *Look East Policy* – Perdana Menteri Manmohan Singh dari Partai Kongres pada pemerintahan sebelumnya. Modi ingin menampilkan politik kerakyatan yang menekankan ideologi politik Hindutva, nasionalisme ekonomi, dan pengaruh India di kawasan, yang berbeda dengan para pendahulu sebelumnya (Plagemann & Destradi, 2019; Wojczewski, 2020).

Komitmen Modi sebagai Perdana Menteri India tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan ideasional. Pada tataran struktural, pemerintahan India perlu merespon terhadap kebutuhan akan aliansi yang lebih besar dengan negara-negara di Asia. Pemerintah India mengharapkan kawasan ini akan mempertemukan berbagai kepentingan negara-negara di Samudra Hindia dan Pasifik. Selanjutnya, pada aspek ideasional - kebangkitan Cina dan Jepang, serta dinamika ekonomi Asia Tenggara turut memengaruhi kebijakan luar negeri India terhadap Asia. Elit India di seluruh spektrum ideologis berkomitmen pada visi India sebagai kekuatan besar di Asia (Pardesi, 2018). Ia mempersepsikan dirinya sebanding untuk bersaing dengan kekuatan Cina di Asia. Sementara, pembangunan kapasitas dan legitimasi pemerintahan telah dimulai di dalam negeri. Pemerintahan PM Modi merapatkan barisan melalui partai yang mengobarkan nasionalisme India dan penguatan identitas lokal dalam rangka membangun dukungan publik. (Basrur, 2017; Ogden, 2018; Pardesi, 2021; Plagemann & Destradi, 2019; Wojczewski, 2020)

2) Kepentingan Ekonomi

Orientasi kebijakan luar negeri yang menekankan kepemimpinan India diyakini sebagai instrumen mencapai target-target tujuan pembangunan nasional yang memanfaatkan sumber daya dari luar negeri. Hal ini disandarkan pada sejarah lahirnya *'Act East Policy'* yang merupakan respons terhadap pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang pernah disampaikan pemerintah India pada KTT ASEAN-India tahun 2014. Melalui kebijakan ini, PM Modi merekomendasikan agar hubungan ekonomi India dan ASEAN dipercepat (Fadilah & Pambudi, 2020). Kebijakan ini merupakan cikal bakal dari terbukanya liberalisasi ekonomi di India yang awalnya pasif menjadi aktif dengan adanya investasi asing (Sikri, 2014). Pemerintah India juga mempertimbangkan persoalan pengangguran disertai dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi yang harus meningkat guna mempertahankan stabilitas politik dan sosial di dalam negeri (Rahmadhani & Pahlawan, 2016).

3) Keamanan geopolitik

Peran aktif pemerintahan PM Modi di kawasan Asia Tenggara melalui kemitraan bilateral dan multilateral menjadi pertimbangan kepentingan geopolitik India. Hal ini turut dipengaruhi oleh perubahan konsep keamanan India pasca Perang Dingin yang lebih berkonsentrasi terhadap kerja sama ekonomi (Rahmadhani & Pahlawan, 2016). Dalam

sejarahnya, *'Look East Policy'* di bawah kepemimpinan Perdana Menteri P. V. Narasimha Rao yang lahir pada tahun 1991 muncul setelah berakhirnya Perang Dingin di saat negara-negara Eropa Timur yang sedang dilanda krisis dan hubungan India dengan negara-negara tersebut terputus. Di tengah kondisi ekonomi yang memburuk, India mencari cara untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan membuat sebuah kebijakan di tengah kondisi konflik geopolitik Perang Teluk yang memanas dan menyulitkan India untuk bekerja sama dengan negara yang terlibat di dalam konflik tersebut. Maka India berusaha memulai kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan untuk memperkuat pengaruh India di kawasan regional dan membawa India menghadapi perubahan tatanan global (Gordon, 2010).

Untuk mendekatkan diri dengan negara-negara ASEAN, awal mula perkembangan kerja sama yang dilakukan oleh India terhadap wilayah Asia Tenggara adalah dengan dibentuknya proyek sungai Mekong Gangga pada tahun 2000-an yang di dalamnya diikuti oleh India, Vietnam, Laos, Kamboja dan Thailand. Hubungan India dan ASEAN semakin erat dengan diselenggarakannya ASEAN-India Summit pada tahun 2002 di Phnom Penh, Kamboja (Annisa, 2020). India memahami bahwa untuk menguatkan basis regional, ia harus memulai kerja sama yang dimulai dari Asia Tenggara sebagai kawasan terdekat sebelum nantinya merambah ke Asia Pasifik (Rahmadhani & Pahlawan, 2016).

Kemitraan Strategis India di Kawasan Asia Tenggara

1) ASEAN

Dalam perspektif India, Asia Tenggara secara geopolitik merupakan wilayah yang bernilai strategis. Negara-negara ASEAN merepresentasikan nilai perdagangan yang sangat besar di Asia dan sekaligus mempunyai kedekatan kultural historis yang mendukung kepentingan politik luar negeri India (Kumar et al., 2023). Dominasi politik dan ekonomi China yang cukup kuat di wilayah Asia Tenggara memotivasi India melakukan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN. Percepatan hubungan ekonomi India-ASEAN sempat diumumkan PM Modi pada KTT ASEAN-India yang diadakan pada tahun 2014. Hal ini sebagai bentuk respon dari era baru pengembangan model perekonomian dan industrialisasi yang dicanangkan oleh pemerintahan PM Modi. Selain itu, perluasan kerja sama India-ASEAN pada bidang keamanan dan maritim selaras dengan kepentingan keduanya yang memandang kedua bidang tersebut sebagai isu yang strategis (Fadilah & Pambudi, 2020).

Ekonomi menjadi jantung kerja sama antara India dan ASEAN terutama pada sektor perdagangan yang telah diperkuat melalui *ASEAN-India Free Trade Agreement* (AIFTA). Pada KTT di Phnom Penh tahun 2002 status kemitraan ASEAN-India ditingkatkan menjadi mitra wicara ASEAN di tingkat kepala negara. Kedua pihak sepakat untuk menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and ASEAN* yang dilakukan pada pertemuan ke-2 ASEAN-India tahun 2003. *Framework Agreement* meletakkan dasar yang kuat untuk pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-India. Poin pertama yang tercantum dalam *Framework Agreement* adalah mengenai pembentukan ASEAN-India RTIA yang di dalamnya terdapat penentuan area perdagangan bebas (*free trade area*) di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi; pernyataan mengenai pembentukan ASEAN-India Trade Negotiation Committee (TNC) yang berfungsi sebagai pelaksana negosiasi ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam *Framework Agreement*; penetapan mengenai *Early Harvest Program* (EHP) yang di dalamnya terdapat penetapan *Rules of Origin* (ROO); perlakuan khusus kepada negara-negara anggota baru ASEAN; jadwal efektif berlakunya perjanjian (*entry into force*) dan beberapa ketentuan lainnya. *Framework Agreement* tersebut berkontribusi dalam mengeratkan hubungan dagang antara ASEAN dengan India (Darmastuti & Amelia, 2014).

AIFTA merupakan bentuk kerja sama pasar bebas India dan ASEAN yang memiliki sebutan lain yaitu ASEAN+1 yang telah dibahas sejak tahun 2003 lalu dalam KTT ASEAN ke-3 di Bali mengenai kerangka kerja sama perdagangan bebas yang berupa barang, jasa, dan investasi. Akan tetapi AIFTA baru secara resmi ditandatangani pada 13 Agustus 2009 di Bangkok. India menjadi mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN. *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ini tidak terjadi serentak di semua negara. Sesuai dengan kesepakatan, pada 1 Januari 2010 yang menerapkan adalah negara Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura dan India. Sedangkan Indonesia, memberlakukan perjanjian perdagangan bebas pada 1 Oktober 2010 (Darmastuti & Amelia, 2014).

Berdasarkan Perjanjian, Negara Anggota ASEAN dan India telah sepakat untuk membuka pasar di masing-masing negaranya dengan semakin mengurangi dan menghilangkan pajak pada 76,4% dari cakupan barang. Kegiatan kerja sama ekonomi di

bawah AIFTA dilakukan di bidang pertanian, perikanan, kehutanan; jasa; penambangan dan energi; ilmu dan teknologi; transportasi dan infrastruktur; dan banyak sektor lainnya (Ditjen PPI, 2018).

Kerja sama AIFTA berguna untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam menciptakan pasar yang besar dengan skala kesempatan dan ekonomi yang lebih besar untuk membuka peluang usaha dari para pihak serta meningkatkan daya tarik para pihak terhadap modal dan kemampuan. AIFTA dapat membuka peluang yang luas bagi peningkatan ekspor diantara negara-negara ASEAN dan juga India (Darmastuti & Amelia, 2014). Adanya kerja sama ini telah memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak, seperti yang dilansir dari laman Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang membahas tentang kerja sama ASEAN-India (Ditjen PPI, 2018), meliputi:

- a) Terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan barang antara para pihak;
- b) Terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif dengan diterapkannya penghapusan ekonomi biaya tinggi dan penyederhanaan perizinan;
- c) Meningkatnya produktivitas secara internal untuk memperkuat daya saing;
- d) Meningkatnya perdagangan barang di antara para pihak;
- e) Meningkatnya peluang pasar produk ekspor Indonesia ke India dengan tingkat tarif bea masuk yang relatif lebih rendah atau bebas;
- f) Meningkatnya kerja sama antara pelaku usaha di kedua negara melalui aliansi strategis yang didukung dengan kepastian mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- g) Adanya peluang pemanfaatan teknologi di antara para pihak yang semakin terbuka.

Pemerintahan PM Modi bertujuan meningkatkan India sebagai pusat manufaktur global di kawasan Asia Selatan dengan menargetkan pendapatan manufaktur 25 persen dari keseluruhan nilai PDB tahun 2025. India sangat percaya diri dengan potensi industri nasional yang telah dipetakan khususnya elektronik dan perangkat keras IT. Hal ini mempertimbangkan jumlah populasi yang besar sebagai tenaga kerja dan daya beli domestik yang relatif rendah sehingga mendorong perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Pemerintah India menargetkan pangsa pasar internasional 3,5 persen pada tahun 2020 sehingga membutuhkan integrasi yang lebih serius ke dalam rantai nilai global. Industri elektronik dan perangkat keras TI memiliki potensi untuk beralih ke manufaktur bernilai lebih tinggi. Namun, dalam proses manufakturnya sektor-sektor yang diandalkan ini sangat bergantung pada produk dari berbagai negara (Grinsted et al., 2018).

2) BIMSTEC

Melalui Deklarasi Bangkok, India dengan Bangladesh, Srilanka dan Thailand mengembangkan kerja sama ekonomi pada tahun 1997. Organisasi yang sebelumnya bernama BISTEC (*Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Thailand Economic Cooperation*). Prakarsa Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multi-Sektoral atau yang disingkat dengan BIMSTEC, ditandatangani pada 6 Juni 1997 dengan penambahan Myanmar pada 22 Desember 1997, Bhutan dan Nepal pada Februari 2004 (ADB, 2015; Bimstec, 2021). Berkantor pusat di Dhaka di Bangladesh, BIMSTEC mempunyai empat belas sektor prioritas meliputi Perdagangan dan Investasi, Teknologi, Energi, Transportasi dan Komunikasi, Pariwisata, Perikanan, Pertanian, Kerja Sama Budaya, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana, Kesehatan Masyarakat, *People-to-Contact*, Pengentasan Kemiskinan, Kontra Terorisme dan Kejahatan Transnasional, Perubahan Iklim, di mana masing-masing negara anggota secara sukarela memimpin satu atau lebih sektornya. Pembentukan BIMSTEC secara tidak langsung menjadi penghubung antara Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan memperkuat hubungan antara tujuh negara (Byju's, 2022).

BIMSTEC merupakan cerminan dari pertemuan kepentingan ekonomi kebijakan *Look East* India dan kebijakan *Look West* Thailand. Melalui konektivitas fisik, integrasi ekonomi, dan kerja sama sub-regional, komunitas ini bercita-cita untuk mengatasi kesulitan pembangunan di sub-wilayah Teluk Benggala dan mengintegrasikan Asia Selatan dan Tenggara. Secara umum BIMSTEC menyoroti tiga bidang kerja sama yang penting bagi negara-negara anggota yaitu konektivitas, integrasi ekonomi, dan energi. Negara-negara anggotanya kaya akan sumber daya, berkembang secara politik, dan beragam secara etnis. Selama pertemuan puncak pertama pada tahun 2004, langkah ambisius pertama BIMSTEC adalah mengadopsi kerangka kerja untuk perjanjian perdagangan bebas barang dan jasa di antara negara-negara anggota (Shekar, 2014).

Partisipasi aktif dalam BIMSTEC sangat penting bagi kepentingan pemerintah India karena; (1) akan membantu perwujudan 'act east policy' yang dimulai dari kekuatan hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mengembangkan proyek 'Sagar Mala' yang ambisius, (2) membangun kekuatan geopolitik yang menghubungkan India dengan Asia Tenggara; dan (3) memimpin pembangunan ekonomi negara-negara bagian timur laut India – dengan menghubungkan mereka ke wilayah Teluk Benggala melalui

Bangladesh dan Myanmar. Hal ini memungkinkan India untuk melawan pengaruh China yang mencakup negara-negara di sekitar Teluk Benggala sebagai dampak *One Belt and One Road Initiative* (Byju's, 2022).

India adalah negara dengan ekonomi terbesar di kawasan BIMSTEC. Keuntungan yang bisa diperoleh India dari enam negara anggota lainnya adalah bahan baku dan tenaga kerja yang lebih murah. Dari sisi ekonomi, perdagangan intra-regional BIMSTEC juga dinilai lebih menjanjikan bagi India. Kehadiran Thailand dan Myanmar di kawasan itu membuka pintu perdagangan India dengan negara-negara Asia Tenggara. Nilai perdagangan India dengan negara-negara BIMSTEC mencapai 3,9 persen dari total perdagangan India dengan mitranya (Rahmadhani & Pahlawan, 2016).

BIMSTEC juga merupakan blok perdagangan terkemuka di kawasan Asia Pasifik, dengan perdagangan intra-regional jauh lebih tinggi daripada EAEG (Kelompok Ekonomi Asia Timur) dan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Mayoritas negara anggota BIMSTEC memulai liberalisasi perdagangan pada 1990-an. Dengan liberalisasi sektor eksternal, impor dan ekspor suatu negara cenderung meningkat. Dengan asumsi bahwa negara-negara menerapkan kebijakan menurunkan hambatan tarif yang berdampak pada peningkatan jumlah dan nilai impor. Oleh sebab itu, volume perdagangan di kawasan menjadi meningkat dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini mempertimbangkan peningkatan ekspor negara-negara BIMSTEC mampu memperluas sektor manufaktur sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Selanjutnya, perdagangan BIMSTEC memungkinkan negara-negara non-anggota untuk membeli barang modal, yang diyakini akan meningkatkan pertumbuhan dari negara-negara ekonomi maju di kawasan tersebut sebagai mitra (Rahmadhani & Pahlawan, 2016).

Singapura dan Malaysia sama-sama memiliki teknologi dan sumber daya unggul yang dapat membantu negara-negara BIMSTEC mencapai dua tujuan penting: (1) pengembangan proyek infrastruktur dan energi, serta (2) perluasan basis keterampilan dan teknologi negara-negara anggota. Kedua negara dianggap memiliki rekam jejak kemampuan dan kesiapan untuk berinvestasi di pasar India dan melaksanakan proyek pengembangan, konektivitas, dan energi yang signifikan. BIMSTEC memberi peluang perusahaan-perusahaan ASEAN akses ke pasar yang jauh lebih besar dan lebih kaya sumber daya. Bangladesh, provinsi timur laut India, dan Myanmar memiliki sumber daya

energi yang melimpah, terutama listrik dan gas alam. Selain itu, negara-negara Asia Timur telah lama berkeinginan untuk menembus pasar Asia Selatan yang lebih luas. BIMSTEC menawarkan kemungkinan itu tanpa berbenturan dengan visi Indo-Pasifik. Di atas segalanya, kerja sama BIMSTEC memungkinkan negara-negara maju untuk memusatkan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan setengah dari penduduk miskin Asia (Shekar, 2014).

Dengan demikian, kerja sama yang dibangun India dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu strategi India yang berkepentingan pada penguatan kedekatan geografis dan pembangunan ekonomi guna menciptakan ketergantungan antar kawasan. Meski kelompok negara BIMSTEC belum memiliki kapasitas pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, setidaknya forum ini memfasilitasi peran kepemimpinan India di kawasan Asia Selatan.

Kerja Sama Pendidikan India-Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bagian ini menggambarkan diplomasi sains sebagai instrumen kepentingan kebijakan luar negeri India di Indonesia. Berdasarkan kepentingan bilateral dan regional di Asia Tenggara, penting bagi pemerintahan PM Modi untuk memelihara hubungan dengan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara di Asia Tenggara telah memiliki sejarah hubungan bilateral dengan India bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemitraan tradisional antara India dan Indonesia didasarkan pada kepentingan politik, keamanan, dan sosial budaya bersama. Sejarah perjuangan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, serta peran India sebagai mitra dialog penuh ASEAN sejak tahun 1995, memotivasi kedekatan India dengan Indonesia (Ganguly & Pardesi, 2009). Dalam hal keamanan, India telah bergabung dalam forum kerja sama maritim ASEAN dan berjanji untuk berkontribusi pada pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik (Indonesia, 2019; Naidu, 2004, 2010). Selanjutnya, akar budaya India telah memengaruhi struktur masyarakat nusantara yang telah dikenal sebagai warisan sejarah Hindu-Budha sejak abad ke-5 Masehi (Indradjaja & Hardiati, 2014; Prabowo, 2020).

Diplomasi sains India memanfaatkan kebutuhan akan pendidikan berkualitas bagi negara-negara mitra ASEAN. Sebagian besar akademisi mengakui perkembangan India sebagai negara berpengaruh di Asia Selatan dan mengejar kemajuan pada berbagai bidang (Basrur, 2017; Lopes Jr., 2015; Metaxas et al., 2016; Ogden, 2018; Plagemann &

Destradi, 2019; Wojczewski, 2020). Kemajuan yang diperoleh oleh India tersebut, tentu saja telah menarik perhatian dari Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan India. Terkhusus kerja sama di bidang pendidikan, hubungan bilateral yang dimiliki oleh India dan Indonesia telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada kunjungan negara kedua ke India pada tanggal 24-26 Januari 2011 sebagai *Chief Guest* dalam acara *Republic Day* India. Pada pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani 18 MoU (*Memorandum of Understanding*) di berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. MoU kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, Prof. Mohammad Nuh dan Menteri HRD India, Kapil Sibal, pada tanggal 25 Januari 2011. Implementasi awal dari kerja sama ini yaitu di mana pada awal tahun 2011, Indonesia telah memiliki Atase Pendidikan di KBRI India. Melalui Atase Pendidikan ini, kerja sama pendidikan di antara kedua negara akan lebih mudah dan optimal dilakukan (Afrahunnisa, 2011).

Selanjutnya menindaklanjuti MoU kerja sama pendidikan India-Indonesia, maka pada tanggal 9 September 2011, diadakan *the Join Working Group (JWG) Meeting* pertama di New Delhi. Pertemuan tersebut digunakan sebagai media untuk membahas langkah konkrit dalam meningkatkan kerja sama pendidikan Indonesia dan India. Pada pertemuan pertama yang telah dilangsungkan tersebut, terdapat beberapa kesepakatan yang diperoleh, seperti contoh diadakannya *Program of Academic Researching* yang merupakan program di mana Indonesia mengirim dosen-dosen senior Indonesia untuk melakukan *joint research* di India, dosen-dosen tersebut juga akan belajar metodologi mengajar dan manajemen pengelolaan perguruan tinggi. Selain itu, Indonesia juga mengundang para peneliti muda dari India untuk melakukan kegiatan *Post-Doctoral* di berbagai universitas di Indonesia dan kerja sama pengembangan *Education Qualification Framework* (Afrahunnisa, 2011).

Pada tahun 2015, kedua negara juga mempererat kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan melalui pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Mendikbud Indonesia saat itu yakni Bapak Anies Baswedan bersama dengan kedua menteri dari India di New Delhi, yakni Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) HE Smiriti Irani dan Menteri Kebudayaan Mahesh Sharma. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Indonesia dan India sepakat untuk melakukan kerja sama pendidikan dan kebudayaan hingga level teknis dan implementasi. Mereka akan saling mengirimkan tim peneliti untuk mempelajari bidang kurikulum dan

pelatihan guru di negara masing-masing (Oebaidillah, 2015). Selain mengirimkan tim peneliti, dalam rentang waktu 2013-2014 pemerintah India juga mengadakan beasiswa bagi siswa berprestasi dari Indonesia, di mana setiap tahunnya India membuka 20 slot bagi siswa-siswa berprestasi yang beruntung untuk melanjutkan studi mereka di universitas dan perguruan tinggi India. Beasiswa diberikan untuk studi di tingkat Sarjana dan Pasca-Sarjana dan mata pelajaran penelitian di M.Phil dan Ph.D. Beasiswa ini dikelola oleh *Indian Council of Cultural Relations* (ICCR) di bawah *General Culture Scholarships Scheme* (GCSS) (Fitri, 2013).

ICCR (*Indian Council for Cultural Relations*) didirikan segera setelah Kemerdekaan, pada tahun 1950 dan kurang lebih memiliki 24 pusat di luar negeri serta 14 kantor regional di India, dan berencana untuk membuka 14 pusat lainnya dalam waktu dekat di Asia Timur dan Tenggara, Eropa, dan Afrika, termasuk di Bangkok, Kuala Lumpur, Paris, São Paulo, Tokyo, dan Washington. Pusat-pusat ini menjalankan fungsi yang berbeda tergantung pada lokasinya. Beberapa pusat bertugas untuk melayani diaspora India, sementara cabang cabang yang lain yang berada di ibu kota besar seperti London atau Moskow memiliki peran yang lebih luas. Pusat-pusat yang lebih kecil, misalnya di Kabul, dibuka pada tahun 2007, berkonsentrasi pada promosi kesusastraan, musik, tari, dan yoga India. Pusat-pusat yang lebih besar, seperti di Suva, Fiji, yang telah beroperasi sejak 1972, menyediakan pelajaran bahasa Hindi dan memelihara kontak dengan LSM di komunitas lokal India. ICCR menjadi institusi yang mapan berfungsi dalam diplomasi publik India (Hall, 2013; Shah et al., 2017).

ICCR juga memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola pertukaran akademik. Saat ini, ICCR menawarkan dukungan keuangan untuk sekitar 2.300 mahasiswa asing di universitas India, 675 di antaranya berasal dari Afghanistan dan 500 dari negara-negara Afrika. Sebagian besar beasiswa yang tersisa ditargetkan ke negara-negara Asia Selatan, terutama Bangladesh, Mauritius, dan Sri Lanka. ICCR juga mendanai sekitar 30 sarjana India untuk menempati kursi panjang (dua tahun) dan jangka pendek (tiga sampai enam bulan) di universitas luar negeri, sekitar setengahnya dikhususkan untuk pengajaran bahasa Hindi dan bahasa India lainnya di luar negeri sebagai upaya penyebaran budaya dan *soft power* dari India itu sendiri (Das, 2013; Khanna & Moorthy, 2017; Kugiel, 2012).

India merupakan negara yang unggul dalam bidang pendidikan, hal inilah yang menarik Indonesia untuk terus melangsungkan kerja sama pendidikannya dengan India.

Kerja sama yang tetap awet dan berkembang menjadi prospek yang semakin bagus bagi kedua negara dalam bidang pendidikan. Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang beranggotakan PTS di Jakarta membentuk suatu jaringan kerja sama Indonesia-India di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti). Salah satu implementasi kerja sama pendidikan Indonesia dan India yakni melalui seminar internasional Indonesia-India Higher Education Forum 2019 yang diadakan di Universitas Yarsi, Jakarta. Kepala LL Dikti Wilayah III, Illah Sailah menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang maksimal bagi pendidikan tinggi Indonesia dan India, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, studi banding, dan pertukaran pengetahuan mahasiswa serta pengabdian masyarakat (Raharjo, 2019).

Selanjutnya, pada awal tahun 2020 pemerintah India menawarkan beasiswa untuk para dosen perguruan tinggi di Indonesia untuk studi lanjut program doktor di India dalam program 1000 Asean Ph.D Fellowship. Program ini melibatkan *India Institute of Technology Delhi* (IITD) sebagai *National Coordinator Asean Fellowship Program*. IITD secara terjadwal melakukan kunjungan sekaligus mendiseminasikan program tersebut dan mempromosikan IIT Delhi serta beberapa program penelitian. Program ini memberikan kesempatan bagi dosen-dosen yang masih bergelar master untuk menempuh pendidikan program doktoral di India, mengingat dalam bidang ilmu dan teknologi India terbilang cukup maju (Agung, 2020). Keunggulan India dalam sistem pendidikan dan kualitas SDM-nya yang lebih baik dari Indonesia, terutama pada bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu dan teknologi tersebut, diharapkan dapat membawa Indonesia dan India untuk bekerja sama dalam sektor kesehatan. Dukungan teknologi kesehatan dan farmasi bisa membantu kedua negara dalam meningkatkan pelayanan (Triandana, 2013).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bersama dengan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia membicarakan berbagai upaya untuk mempererat dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral antarkedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Pada pertemuan tersebut, Dubes India H.E Mr. Pradeep Kumar Rawat menyampaikan keinginan India kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Menhan RI untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia, khususnya di bidang pelatihan dan pendidikan, yakni pertukaran siswa dan pengajar. Kedua negara telah melakukan kerja sama pertukaran siswa untuk mengikuti beberapa program pendidikan. Hingga tahun 2019, tercatat sebanyak 368 prajurit TNI mengikuti

pendidikan di India, dan sebaliknya pula 50 prajurit India mengikuti pendidikan di Indonesia (Kemenhan RI, 2019).

Prospek kerja sama pendidikan antara Indonesia dan India cukup menjanjikan, melihat dari perkembangan yang sudah ada menurut pengalaman salah satu akademisi Indonesia (Afrahunnisa, 2011), antara lain: *Pertama*, sejarah kerja sama yang sudah terbangun cukup lama, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam artian luas, interaksi antara kedua negara ini bisa kita lihat dari pengaruh dari India ke Indonesia yang muncul dan menetap, seperti budaya, musik, bahasa, agama, dan lain sebagainya. *Kedua*, Pendidikan India mempunyai banyak keunggulan dan secara intensif mulai membangun kerja sama internasional dengan berbagai negara. Penjelasan secara singkatnya, yaitu kualitas pendidikan India tidak kalah dengan kualitas pendidikan yang ada di Amerika dan Eropa. *Ketiga*, Indonesia dan India pada dasarnya mempunyai kondisi dan persoalan bangsa yang memiliki banyak kesamaan, seperti sama-sama merdeka setelah PD II, mempunyai jumlah penduduk yang besar dan padat, dan juga sama-sama negara demokrasi. *Keempat*, pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan di kedua negara sudah merespon positif upaya untuk semakin menguatkan kerja sama pendidikan tersebut.

Hal ini dikuatkan oleh perwakilan PPI India yang menyatakan bahwa fasilitas dan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa asing sangat memadai. Pada semua jenjang pendidikan di perguruan tinggi India, kuliah diberikan oleh seorang Profesor. Dalam konteks beasiswa India yang diterima oleh mahasiswa asing, hampir 75 persen Perguruan Tinggi menyediakan asrama yang terjangkau. Boleh dibilang biaya asrama yang berkisar Rp 2.500 atau Rp 500.000 per semester cukup murah dengan fasilitas yang didapatkan. Biaya Seluruh mahasiswa diberikan pelayanan yang optimal mendukung kelancaran studi antara lain, (1) jaringan internet yang cepat, (2) klinik kesehatan, (3) makan 3 kali sehari, (4) perpustakaan 24 jam, dan (5) harga buku referensi yang sangat terjangkau. Pemerintah India berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang terintegrasi dan berkualitas sehingga menjadi pilihan studi bagi mahasiswa asing. Dengan demikian, mahasiswa asing dapat berkompetisi dengan sesamanya berdasarkan kemudahan akses fasilitas dan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi India (Aufiya, 2021).

Berdasarkan hasil analisis wawancara, citra India didapatkan dari interaksi mahasiswa Indonesia di India dengan kegiatan-kegiatan Kementerian Luar Negeri.

Komunitas mahasiswa Indonesia di India mempunyai hubungan strategis dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Interaksi yang intens antara komunitas PPI India dengan Kemenlu direpresentasikan melalui kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di India, seperti perayaan hari besar keagamaan dan seremonial peringatan HUT Kemerdekaan RI. Bahkan narasumber menyampaikan para pejabat seperti Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Pertahanan dan Atase Perdagangan serta para diplomat yang bertugas di India digambarkan sebagai orang tua. KBRI senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan PPI India juga sebaliknya. Dalam beberapa kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan pihak India, PPI India juga diminta membantu dalam teknis pelaksanaannya, khususnya agenda yang ada di kota New Delhi dan sekitarnya (Aufiya, 2021). Subsidi pendidikan yang besar oleh pemerintah India menjadi manifestasi dari citra India sebagai negara yang mempunyai SDM berkualitas dan sistem pendidikan yang berstandar internasional. Citra ini dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi sains di mana India menawarkan 1000 beasiswa kepada negara-negara ASEAN (Agung, 2020; Ministry of Education, n.d.).

Seperti yang kita ketahui bersama, efektivitas pendekatan *hard* dan *soft power* bergantung pada aksesibilitas sumber daya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Rusia dengan pendapatan nasional yang lebih tinggi secara finansial mampu mempertahankan angkatan bersenjata yang besar dan menekan ekonomi negara-negara lain. Aksesibilitas sumber daya *soft power* tidak terlalu bergantung pada ukuran negara (Khanna & Moorthy, 2017; Thussu, 2016). Seperti yang ditunjukkan oleh contoh Norwegia dan Jepang, Negara-negara kecil pasti memiliki kemampuan untuk membangun *soft power* nya. Sehingga, dalam memandang pemerintah India segera setelah kemerdekaannya yang di mana tidak memiliki kemampuan ekonomi dan militer, berusaha untuk bergantung pada *soft power* dengan menciptakan dan memilih opsi alternatif yang menjamin posisinya di ranah Internasional (Khanna & Moorthy, 2017). Dalam perspektif diplomasi sains, India cukup berhasil mendukung proses studi lanjut pelajar Indonesia dan menanamkan kesan yang baik.

Pengaruh India pada abad-abad awal berupa dinasti kerajaan, sebagian Hindu dan sebagian Buddha yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan dan wilayah di Asia Tenggara. Pengaruh yang dibawa oleh India melalui penyebaran agama Hindu-Buddha telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan budaya Indonesia

(Trivedi, 2010). Di Indonesia, warisan seni dan budaya India tetap terlihat jelas dalam arsitektur kuno, kesusastraan, tari dan musik, kosakata bahasa, dan lain-lain. Latar belakang historis yang dimiliki oleh India dan Indonesia semakin mempererat hubungan dalam menjalin hubungan kerja sama bilateral (Supriyanto, 2013). Lalu pada abad ke-16 Islam secara bertahap diperkenalkan oleh pedagang India dari Gujarat dan saat ini membuat 90% mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (Nayyar, 2000). Secara historis, India dan Indonesia memiliki hubungan dagang dan latar belakang agama yang sama, di mana sejak berabad-abad lalu masyarakat Jawa dan Sumatra telah menyambut orang India yang datang ke pulau untuk berdagang. Indonesia menyerap tiga agama utama India, yaitu Hindu dari zaman kuno, Buddha di abad pertengahan, dan Islam dari abad ke-12. Tradisi sosio-kultural telah membuat hubungan antara India dan Indonesia menjadi unik dan kuat (Trivedi, 2010).

Dalam memperingati 70 tahun hubungan bilateral, Wakil Menteri Luar Negeri menekankan bahwa India merupakan mitra tradisional Indonesia. Kedua negara terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateralnya melalui kemitraan strategis yang dibentuk pada 2005, yang kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis menyeluruh pada 2018. India menjadi negara yang kali pertama mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia dan bersama-sama memprakarsai gerakan anti-kolonialisme yang dikenal dengan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 (Brewster, 2011; Wardhah, 2019; Zaman, 2015).

India telah berjasa dalam membantu Indonesia di awal masa kemerdekaannya, salah satu tokoh dari India yang paling berjasa adalah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Hal itu dikarenakan ketika Belanda memblokir wilayah Indonesia dari luar, India membantu mengirimkan obat-obatan dan berbagai macam bantuan lain untuk perjuangan Indonesia. Selain itu, pada tahun 1949 Jawaharlal Nehru mengundang Indonesia untuk menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi. Forum tersebut membahas Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Konferensi tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, Oceania, termasuk Cina, Afghanistan, Arab Saudi, Irak, dan negara-negara lainnya. Pada konferensi ini memberikan hasil yang cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun tangan untuk mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia. Walaupun Belanda tetap kukuh mempertahankan sikapnya,

namun akhirnya PBB punya pertimbangan dan menerbitkan resolusi tertanggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesia (Raditya, 2018).

Kerja sama Indonesia dan India pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berfokus pada ekonomi dan maritim. Di bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan akses pasar ekspor bagi produk potensial kedua negara dengan target perdagangan bilateral USD 50 Miliar pada tahun 2025. India merupakan pasar potensial komoditas kelapa sawit Indonesia dan turunannya serta *stainless steel*. Dalam konteks pertahanan keamanan, India konsisten dalam mendukung integritas teritorial Indonesia dan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*. Sebagai dua negara maritim, kedua pihak menindaklanjuti pengembangan konektivitas dan kerja sama antara Aceh dan Andaman-Nicobar dalam Pertemuan *the Joint Task Force* antara RI dan India. Selain itu, kedua negara juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian batas maritim di Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Lebih jauh, Indonesia dan India sepakat untuk menjajaki kolaborasi kedua negara melalui produksi bersama sektor industri pertahanan, seperti yang telah dilakukan PT Pindad dan Tata Motors sebelumnya. India menjadi investor terbesar ke 25 untuk Indonesia, khususnya dengan adanya pabrik TVS Motor Company Indonesia di Karawang. Investasi yang didirikan pada masa pemerintahan Presiden SBY ini menimbulkan rantai bisnis yang makin baik, mulai dari industri komponen perakitan, jasa jual beli kendaraan bermotor, dan bengkel dan di mana menyerap tenaga kerja langsung dan tak langsung (Kemlu RI, 2019a, 2019b; Setneg RI, 2007).

Simpulan

India pada masa pemerintahan PM Narendra Modi begitu ambisius dalam mengembangkan kerja sama dalam forum bilateral maupun multilateral. Upaya ini dipahami sebagai penerapan orientasi kebijakan luar negeri yang bersifat internasionalisme. India ingin dicitrakan sebagai negara yang besar dengan kapasitas sumberdaya ekonomi dan politik yang menetakannya sebagai pemimpin Asia Selatan.

Sebagai penerapan doktrin ‘act east policy’ PM Modi memperluas prioritas kerja sama terhadap negara-negara ASEAN khususnya Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan India seiring dengan menguatnya pengaruh China di kawasan. Pemerintah India menyadari bahwa Indonesia mempunyai pengaruh politik dan ekonomi yang besar di kawasan ASEAN. Kemitraan dengan ASEAN

diharapkan mempertahankan integrasi India pada pasar bebas di kawasan, mencapai target pengembangan proyek Andaman-Nikobar, dan memperkuat stabilitas keamanan maritim yang lebih besar mendukung kesepakatan Indo-Pasifik.

Diplomasi sains India sesungguhnya mencerminkan perilaku negara-negara maju dalam mencapai kepentingan nasionalnya pasca Perang Dingin. Pemerintah India cukup berhasil mendukung proses studi lanjut komunitas pelajar Indonesia dan hal ini dilandaskan pada citra India sebagai negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang unggul. Diplomasi sains India memanfaatkan kebutuhan akan pendidikan berkualitas bagi negara-negara mitra ASEAN khususnya Indonesia. Diawali dengan penandatanganan MoU tahun 2011, termasuk aspek pendidikan tinggi, satu tahun sejak berlakunya perjanjian perdagangan bebas India-ASEAN. Kemitraan berjalan semakin komprehensif, tidak hanya pemberian beasiswa bagi mahasiswa sarjana dan pasca sarjana, tetapi juga mengembangkan kolaborasi penelitian, dan konsorsium perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- ADB. (2015). *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)*. Asia Regional Integration Center. <https://aric.adb.org/initiative/bay-of-bengal-initiative-for-multi-sectoral-technical-and-economic-cooperation>
- Afrahunnisa, N. (2011). Optimalisasi Kerjasama Pendidikan Indonesia-India. *Buletin Atase Pendidikan KBRI New Delhi Edisi III*, 1–5. <https://123dok.com/document/y6p6omgq-optimalisasi-kerjasama-pendidikan-indonesia-india.html>
- Agung. (2020, January 8). Pemerintah India Tawarkan 1.000 Beasiswa Program Doktor. *UGM*. [https://www.ugm.ac.id/id/berita/18917-pemerintah-india-tawarkan-1-000-beasiswa-program-doktor#:~:text=Pemerintah India menawarkan beasiswa untuk,1000 Asean Ph.D Fellowship.](https://www.ugm.ac.id/id/berita/18917-pemerintah-india-tawarkan-1-000-beasiswa-program-doktor#:~:text=Pemerintah%20India%20menawarkan%20beasiswa%20untuk%2C1000%20Asean%20Ph.D%20Fellowship.)
- Alianza del Pacífico. (2022). *What is the Pacific Alliance?* <https://alianzapacifico.net/en/what-is-the-pacific-alliance/>
- Annisa, F. N. (2020). *Kebijakan Luar Negeri Look East Dan Act East India Dalam Kerjasama Dengan Negara Anggota Asean* [Universitas Komputer Indonesia]. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3364/12/UNIKOM_Firdayanti Nur Annisa_BAB V.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3364/12/UNIKOM_Firdayanti%20Nur%20Annisa_BAB%20V.pdf)
- Basrur, R. (2017). Modi's foreign policy fundamentals: a trajectory unchanged. *International Affairs*, 93(1), 7–26. <https://doi.org/10.1093/ia/iiv006>
- Bimstec. (2021). *About Bimstec*. Bimstec Secretariat. <https://bimstec.org/about-bimstec/>
- Brewster, D. (2011). The relationship between India and Indonesia: An evolving security partnership? *Asian Survey*, 51(2), 221–244. <https://doi.org/10.1525/AS.2011.51.2.221>
- Byju's. (2022). *Bimstec*. IAS Preparation. <https://byjus.com/free-ias-prep/bimstec/>
- Chaudoin, S., Milner, H. V, & Tingley, D. H. (2010). *The Center Still Holds : Liberal*

- Internationalism Survives. *International Security*, 35(1), 75–94.
<https://www.jstor.org/stable/40784647>
- Darmastuti, S., & Amelia, R. L. (2014). Peningkatan Hubungan Ekonomi ASEAN-India Tinjauan Analisis Terhadap ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional*, 1(1), 36–43.
http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/artikel_ji_nasional/pusdiknas/pus-vol1-no1-jul-sep2014/36-43.pdf
- Das, A. K. (2013). Soft and Hard Power in India's Strategy Toward Southeast Asia. *India Review*, 12(3), 165–185. <https://doi.org/10.1080/14736489.2013.820989>
- Ditjen PPI. (2018, June 26). ASEAN - India. *Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional*.
<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-india>
- Fadilah, L., & Pambudi, A. W. (2020). Dampak Implementasi Kebijakan Look East dan Act East India Terhadap Hubungan India dan ASEAN. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 6(1), 46–59.
<https://doi.org/10.52447/polinter.v6i1.4143>
- Fink, G. R., Leshner, A. I., & Turekian, V. C. (2014). Science diplomacy with Cuba. *Science*, 344(6188), 1065–1065. <https://doi.org/10.1126/science.1256312>
- Ganguly, S., & Pardesi, M. S. (2009). Explaining Sixty Years of India's Foreign Policy. *India Review*, 8(1), 4–19. <https://doi.org/10.1080/14736480802665162>
- Gordon, S. (2010, July 17). India 'Looks East' as history. *East Asia Forum*.
<https://www.eastasiaforum.org/2010/07/17/india-looks-east-as-history/>
- Grinsted, P., Kesari, A., & Singh, K. (2018). Quality Rules in India: Trade, Technical Regulations and Consumer Protection. *ORF Issue Brief, june(245)*.
- Hall, I. (2013). India's New Public Diplomacy: Soft Power and the Limits of Government Action. *Asian Survey*, 52(6), 1089–1110.
- Indonesia, M. of F. A. R. of. (2019). *Stronger Indonesia-India Comprehensive Strategic Partnership to Pursue Bilateral Trade Target*.
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/892/berita/stronger-indonesia-india-comprehensive-strategic-partnership-to-pursue-bilateral-trade-target>
- Indradjaja, A., & Hardiati, E. S. (2014). Awal Pengaruh Hindu Buddha Di Nusantara. *KALPATARU*, 23(1), 17–34.
<http://jurnalrkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kalpataru/article/view/48>
- Ittelson, P., & Mauduit, J. (2019). Science & diplomacy: How countries interact with the Boston innovation ecosystem. In *Diplo Foundation*.
file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Ittelson, Mauduit - 2019 - Science & diplomacy How countries interact with the Boston innovation ecosystem.pdf
- Kemenhan RI. (2019, November 13). Menhan RI Terima Dubes India, Bahas Peningkatan Kerjasama Pendidikan dan Latihan. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. <https://www.kemhan.go.id/2019/11/13/menhan-ri-terima-dubes-india-bahas-peningkatan-kerjasama-pendidikan-dan-latihan.html>
- Kemlu RI. (2019a, April 13). Indonesia Dorong Kerja Sama Maritim Asean India Di Kawasan Indo Pasifik. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/188/berita/indonesia-dorong-kerja-sama-maritim-asean-india-di-kawasan-indo-pasifik>
- Kemlu RI. (2019b, September 6). Indonesia – India Dorong Kerja Sama Ekonomi dan Maritim. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.

- <https://kemlu.go.id/portal/id/read/579/berita/indonesia-india-dorong-kerja-sama-ekonomi-dan-maritim>
- Khanna, S., & Moorthy, P. (2017). Analysing India's Soft Power Functioning in the Twenty-first Century: Possibilities and Challenges. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 73(3), 292–311. <https://doi.org/10.1177/0974928417716224>
- Kugiel, P. (2012). India's soft power in South Asia. *International Studies*, 49, 351–376. <https://doi.org/10.1177/0020881714534033>
- Kumar, P., Nurhayati, E., Meilawati, A., Nurcahyawati, E., Arifin, M., Rurut, R., Sendra, M., Kristianto, Y., Nugroho, S., Verma, V. K., & Kumar, S. (2023). *India and Southeast Asia (A Legacy of Cultural Influences)* (G. K. Jha, P. Kumar, & S. Kumar (eds.)). Pathak Publisher and Distributor. <https://www.exoticindiaart.com/book/details/india-and-southeast-asia-legacy-of-cultural-influences-ubj164/>
- Legrand, T., & Stone, D. (2018). Science diplomacy and transnational governance impact. *British Politics*, 13(3), 392–408. <https://doi.org/10.1057/s41293-018-0082-z>
- Lopes Jr., G. P. (2015). The Sino-Brazilian Principles in a Latin American and BRICS Context: The Case for Comparative Public Budgeting Legal Research. *Wisconsin International Law Journal*, 1, 1–45.
- Mauduit, J.-C., & Gual Soler, M. (2020). Building a Science Diplomacy Curriculum. *Frontiers in Education*, 5(August), 1–7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00138>
- Metaxas, T., Eleni, B., & Maria-Marina, M. (2016). Bollywood, India and Economic Growth: A Hundred Years History. *Journal of Economic and Social Thought*, 3(2), 292. <http://www.kspjournals.org/index.php/JEST/article/view/746>
- Ministry of Education. (n.d.). Doctoral fellowship in India for ASEAN. *Government of India*. <https://asean-iit.in/>
- Ministry of Education. (2022). *Doctoral fellowship in India for ASEAN*. Government of India. <https://asean-iit.in/>
- Ministry of External Affairs. (n.d.). *Briefs on Multilateral Relations and other Organizations*. Government of India. Retrieved September 14, 2022, from <https://mea.gov.in/regional-organisations.htm>
- Naidu, G. V. C. (2004). Whither the look east policy: India and Southeast Asia. *Strategic Analysis*, 28(2), 331–346. <https://doi.org/10.1080/09700160408450136>
- Naidu, G. V. C. (2010). India and Southeast Asia. *International Studies*, 47(2–4), 285–304. <https://doi.org/10.1177/002088171104700413>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI_BUKU_METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL.pdf
- Nye, J. (2009). Obama's Smart Power. *New Perspective Quarterly*, 26(2), 7–9. http://digitalnpq.org/archive/2009_spring/02_nye.html
- Ogden, C. (2018). Tone Shift: India's Dominant Foreign Policy Aims Under Modi. *Indian Politics & Policy*, 1(1), 3–23. <https://doi.org/10.18278/inpp.1.1.2>
- Pardesi, M. S. (2021). India's China strategy under Modi continuity in the management of an asymmetric rivalry. *International Politics*, 0123456789. <https://doi.org/10.1057/s41311-021-00287-3>
- Pisupati, B. (2020). Science Diplomacy: COVID-19 and Beyond. *RIS Newsletter*, April 3rd, 1–14. https://ris.org.in/newsletter/diary/2020/Covid_19_III/pdf/Balakrishna_Pisupati.pdf

- Plagemann, J., & Destradi, S. (2019). Populism and Foreign Policy: The Case of India. *Foreign Policy Analysis*, 15(2), 283–301. <https://doi.org/10.1093/fpa/ory010>
- Polanunu, A. B. D., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia Sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 146. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.36645>
- Prabowo, G. (2020). Pengaruh Budaya India di Indonesia. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/29/152416269/pengaruh-budaya-india-di-indonesia?page=all>
- Rahmadhani, N., & Pahlawan, I. (2016). KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation). *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(1), 1–12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7878/7550>
- Ranjbar, M. S., & Elyasi, M. (2019). Science Diplomacy in Iran: Strategies and Policy Alternatives in the Making. *Science Diplomacy Review*, 1(3), 9–21.
- Riordan, S., & Torres Jarrín, M. (2020). Global Policy Perspective Report Science Diplomacy. In *European Institute of International Studies* (January 20, 2020). <http://www.ieeiweb.eu/wp-content/uploads/2020/01/Science-Diplomacy.pdf>
- Setneg RI. (2007, July 17). Kerjasama RI - India Harus Makin Erat. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. https://www.setneg.go.id/baca/index/kerjasama_ri_india_harus_makin_erat
- Shah, S. H., Hasnat, H., & Rosefielde, S. (2017). Comparative Analysis of Chinese and Indian Soft Power Strategy. *Asian Politics & Policy*, 9(2), 268–288.
- Shekar, V. (2014). *BIMSTEC: Can it connect two-fifths of global poor?* (No. 29; PacNet). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/Pac1429.pdf
- Sikri, R. (2014). Challenge and Strategy: Rethinking India's Foreign Policy. *Indian Foreign Affairs Journal*, 9(1), 56–69. <https://www.jstor.org/stable/45340951>
- Stewart-Ingersoll, R., & Frazier, D. (2010). India as a Regional Power: Identifying the Impact of Roles and Foreign Policy Orientation on the South Asian Security Order. *Asian Security*, 6(1), 51–73. <https://doi.org/10.1080/14799850903472003>
- Wang, J. (2011). China's Search for a Grand Strategy: A Rising Great Power Finds Its Way. *Foreign Affairs*, 90(2), 68–79. <https://www.jstor.org/stable/25800458>
- Wardhah, F. (2019, April 24). RI-India Targetkan Nilai Perdagangan Bilateral \$50 Miliar pada 2025. *VoA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/ri-india-targetkan-nilai-perdagangan-bilateral-50-miliar-pada-2025/4888042.html>
- Wojczewski, T. (2020). Populism, Hindu Nationalism, and Foreign Policy in India: The Politics of Representing “the People.” *International Studies Review*, 22(3), 396–422. <https://doi.org/10.1093/isr/viz007>
- Zaman, M. T. (2015). Socio-Cultural Relations Between India and Indonesia. *International Seminar and Conference 2015: The Golden Triangle (Indonesia-India-Tiongkok), Interrelations in Religion, Science, Culture, and Economic.*, 66–69. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/ISC/article/view/1274/1375>